

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 561/Ekonomi Pembangunan
Bidang Fokus : Bidang X

USULAN PENELITIAN DOSEN



PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN KESEMPATAN KERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAMBI

TIM PENGUSUL

Ketua
Anggota

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

2023

BAB I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu Prasetyo (2010). Masalah kemiskinan ini terus menjadi masalah di semua Negara, khususnya Indonesia yang merupakan Negara berkembang.

Kemiskinan ini adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal dan kesehatan. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan tingkat pendapatan tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan, bahkan keberdayaan dan partisipasi. Menurut Dewanto (2014) kemiskinan jangan hanya dianggap sebagai sebuah pendapatan yang rendah (*low income*), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas atau (*capability handicap*). Dengan demikian kemiskinan tidak bisa hanya dipandang dari suatu sisi rendahnya pendapatan tetapi harus dari banyak aspek lain yang saling berkaitan sehingga bersifat multidimensi.

Program penanggulangan angka kemiskinan mutlak diperlukan agar semua kebijakan pemerintah dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan maka perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang faktor-faktor yang bereran penting dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan faktor lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil pertumbuhan keseluruhan sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan mencapai maksimum apabila kondisi tingkat tenaga kerja penuh (*Full Employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan, dan akan mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Maipita, 2014).

Nilai PDRB merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur suatu kesejahteraan suatu wilayah dan perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Semakin meningkatnya PDRB menunjukkan bahwa produk yang meningkat akan meningkatkan pendapatan seseorang sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari data upah minimum provinsi diatas dapat dilihat bahwa nilai upah minimum provinsi Jambi tiap tahunnya mengalami nilai kenaikan yang cukup signifikan selama tahun 2016 sampai dengan 2020, nilai ini dapat menggambarkan bahwa para pekerja yang ada di provinsi Jambi sudah selayaknya mendapatkan upah yang cukup layak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selama satu tahun, dengan upah minimum yang cukup dapat menghindarkan para pekerja dari himpitan kemiskinan.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa Pemerintah dalam hal ini Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau bupati/walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum dan pengenaan denda terhadap pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaian diatur dengan peraturan pemerintah (Hardijan Rusli, 2011).

Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi dan Kesempatan Kerja dapat memberikan dampak terhadap jumlah penduduk miskin di suatu daerah, tidak terkecuali di Provinsi Jambi, untuk melihat jumlah Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, Angkatan Kerja dan jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Jambi, dapat dilihat pada tabel yang ada

dibawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah PDRB, Upah Minimum Provinsi, Kesempatan Kerja dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi 2017-2021

Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)	UMP(Rp)	Kesempatan Kerja (%)	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2017	136,501,71	2,063,948	96.13	286,55
2018	142,902,00	2,243,718	96.14	281,69
2019	149,111,09	2,400,000	95.81	274,32
2020	148,448,82	2,630,000	94.87	277,80
2021	153,881,69	2,649,034	94.90	293.86

Sumber: BPS Provinsi Jambi. 2021

Dari uraian-uraian di atas maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi dan Kesempatan Kerja terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu Negara yang diukur dari perbedaan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total output produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya (Arsyad,2013).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Selain itu pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi pengurangan ketimpangan pendapatan nasional dan pemberantasan kemiskinan.

Guna mencapai sasaran yang diinginkan dalam pembangunan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial kehidupannya.

Menurut Wijaya (2011) pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Menurut Adam Smith dalam Kuncoro (2011) proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki keterkaitan yang erat satu dengan yang lainnya. Dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peranan dalam menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Sementara itu Ricardo dalam Suparmoko (2014) mengemukakan bila jumlah penduduk bertambah terus, maka akumulasi kapital terus menurun terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku hukum tambahan hasil yang semakin berkurang.

Menurut Samuelson dan Nourdhaus (2011), pertumbuhan ekonomi merupakan GNP yang bersumber dari hal-hal berikut:

- a. Pertumbuhan dalam tenaga kerja
- b. Pertumbuhan dalam modal
- c. Pertumbuhan inovasi dan teknologi.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kualitas sumber daya produktif dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya penemuan-penemuan baru, inovatif dan kemajuan teknologi.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa model pertumbuhan ekonomi yang berkembang hingga saat ini yaitu : Teori Pertumbuhan Klasik, Teori pertumbuhan Neo Klasik, model pertumbuhan Regional, dan pertumbuhan Kuznet.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik merupakan salah satu dasar dari teori pertumbuhan yang dipakai baik dari dulu sampai sekarang. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi seperti Adam Smith dan David Ricardo.

Menurut Smith Arsyad (2013) membedakan dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu: pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total sistem produksi suatu negara dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Sumber Daya Alam yang tersedia

Apabila sumber daya alam belum dipergunakan secara maksimal maka jumlah penduduk dan stok modal merupakan pemegang peranan dalam pertumbuhan output. Sebaliknya pertumbuhan output akan terhenti apabila penggunaan sumber daya alam sudah maksimal.

- b. Sumber Daya Insansi

Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan angkatan kerja yang bekerja dari masyarakat.

- c. Stock Barang ModaL

Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal.

2. Teori Neo Klasik

Teori neo klasik yang dipelopori oleh Robert Solow menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan produk nasional ditentukan oleh pertumbuhan dua jenis input yaitu pertumbuhan modal dan pertumbuhan tenaga kerja. Perhatian terhadap dua input tersebut sangat besar karena proses ekonomi memerlukan adanya intensifikasi modal, yaitu suatu proses jumlah modal per tenaga kerja naik setiap saat dan adanya kenaikan tingkat upah yang dibayarkan kepada para pekerja pada saat intensifikasi modal terjadi, sehingga masyarakat mempunyai daya beli tinggi, konsumsi meningkat.
- b. Menurut Robert Solow faktor yang paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi dan peningkatan keahlian serta keterampilan para pekerja dalam menggunakan teknologi.

3. Teori Keynesian

Teori Keynesian, yang dipelopori oleh J.M. Keynes menyatakan bahwa dalam jangka pendek output nasional dan kesempatan kerja terutama ditentukan oleh permintaan agregat. Kaum Keynesian yakin bahwa kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal harus digunakan untuk mengatasi pengangguran dan menurunkan laju inflasi. Konsep-konsep Keynesian menunjukkan bahwa peranan pemerintah sangat besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

4. Teori Harrod-Domar

Salah satu teori pertumbuhan mengenai pembangunan adalah model pertumbuhan Harrod-Domar. Model pertumbuhan ini, secara sederhana dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan dari GNP ($\Delta Y/Y$) ditentukan oleh rasio tabungan nasional (s) dan rasio capital output nasional (k). Sementara, infrastruktur disini dapat dikategorikan ke dalam *Capital Stock* (K) sehingga secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa peningkatan stok kapital termasuk infrastruktur akan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh Harrod-Domar bahwa investasi memiliki peran dalam perekonomian yaitu merupakan bagian dari

pengeluaran agregat dan sebagai penambah jumlah barang-barang modal dalam masyarakat. Dengan kata lain, investasi akan mempertinggi kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang produksi.

Pada model Harrod-Domar investasi diberikan peranan yang sangat penting. Dalam jangka panjang investasi mempunyai pengaruh kembar. Di satu sisi investasi mempengaruhi permintaan agregat di sisi lain investasi mempengaruhi kapasitas produksi nasional dengan menambah stok modal yang tersedia.

Dalam teorinya Harrod-Domar mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang tangguh atau *steady growth* dalam jangka panjang yaitu perlunya investasi. Untuk menciptakan investasi perlu meningkatkan tabungan. Sebagai ahli ekonomi yang mengembangkan konsep Keynes, Harrod-Domar tetap mementingkan peranan pemerintah terutama dalam merencanakan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dalam menghimpun dana untuk keperluan investasi agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Berdasarkan teorinya, Harrod-Domar berkesimpulan apabila pengeluaran agregat meliputi komponen yang lebih banyak, yaitu meliputi pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dalam keadaan yang demikian barang-barang modal yang bertambah dapat sepenuhnya digunakan apabila $AE_1 = C + I_1 + G + (X - M)_1$ dimana $I_1 + G + (X - M)_1$ sama dengan $(I + \Delta I)$

2.3 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 2015). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan

maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2014). Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidak berdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2014). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2016). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin (Nugroho, 2015). Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2014). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya.

Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- 1) Kemiskinan (*Proper*) Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.
- 2) Ketidakberdayaan (*Powerless*) Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan

ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- 3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*) Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.
- 4) Ketergantungan (*dependency*) Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.
- 5) Keterasingan (*Isolation*) Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

2.4 Produk Domestik Regional Bruto

Secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan

perkataan lain arah dari pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quntitative change*) dan biasanya dihitung dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang akhir dan jasa (*final goods and service*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi secara nominal dapat digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB digunakan untuk berbagai tujuan tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor netto.

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, ataupun apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Lincoln Arsyad, 1999).

Penggunaan PDRB sebagai variable independen yang mempengaruhi kemiskinan dikarenakan angka PDRB dapat menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu wilayah tanpa memandang tingkat pendapatan tiap-tiap golongan, sehingga PDRB per kapita hanya mengukur golongan pendapatan tertentu di wilayah tertentu, sehingga dalam menganalisis kemiskinan hanya terbatas pada golongan pendapatan tertentu saja. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi

faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. (BPS, 2012). Menurut Todaro (2012) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut). Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

PDRB dapat didefinisikan berdasarkan tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Produksi

Dengan pendekatan Produksi (*production approach*) produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Dengan demikian, GNP atau GDP menurut pendekatan produksi ini adalah penjumlahan dari masing-masing barang dan jasa dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan, hal ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut : $Y = \sum_{t=1}^n P_t Q_t$

Dimana :

Y = produk nasional atau produk nasional bruto (GNP atau GDP)

P = harga barang unit ke-1 hingga unit ke- n

Q = jumlah barang jenis ke-1 hingga jenis ke- n

2. Pendekatan Pendapatan.

Pendekatan pendapatan (*income approach*) adalah suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi.

Dalam hubungan ini pendapatan nasional adalah penjumlahan dari unsur-unsur atau jenis-jenis pendapatan.

a. Kompensasi untuk pekerja (*compensation for employees*), yang terdiri

dari upah (*wages*) dan gaji (*salaries*) ditambah faktor rent terhadap upah dan gaji (misalnya kontribusi pengusaha untuk rencana-rencana pensiun dan dana jaminan sosial), dan ini merupakan komponen terbesar dari pendapatan nasional.

- b. Keuntungan perusahaan (*corporate provit*), yang merupakan kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana sebagian dari padanya digunakan untuk membayar pajak keuntungan perusahaan (*corporate profity takes*), sebagian lagi dibagikan kepada para pemilik saham (*stockholders*) sebagai deviden, dan sebagian lagi ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.
- c. Pendapatan usaha perorangan (*propriectors income*), yang merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari *self employeed person*, misalnya petani, *self employeed profesional*, dan lain-lain. dengan perkataan lain *propriectors income* merupakan pendapatan *new korporasi*.
- d. Pendapatan sewa (*rental income of person*), yang merupakan kompensasi untuk pemilik tanah, rental businees dan *recidential properties*, termasuk didalamnya pendapatan sewa dari mereka yang tidak terikat dalam bisnis *real estate* : pendapatan sewa dihitung untuk rumah-rumah yang *non form* yang dihuni oleh pemiliknya sendiri; dan royalties yang diterima oleh orang dari hakpaten, hak cipta, dan hak terhadap sumber daya alam.
- e. Bunga netto (*net interest*) terdiri atas bunga yang dibayar perusahaan dikurangi oleh bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga netto yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar oleh pemerintah dan yang dibayar oleh konsumen tidak termasuk didalamnya.

Secara matematis pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NI = Yw + Yi + Ynr + Ynd$$

Dimana:

Yw = Pendapatan dari upah, gaji dan pendapatan lainnya sebelum pajak
 Yr = Pendapatan dari bunga

Y_{nr} dan Y_{nd} = Pendapatan dari keuntungan dari perusahaan dan pendapatan lainnya sebelum pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan nasional atau produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (*final demand*) atas out put yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain produk nasional atau produk domestik regional bruto adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impor (X-M).

2.5 Upah

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan, hasil akibat (dari suatu perbuatan), resiko (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012).

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja menurut (Zaeni Asyhadie, 2017) dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai

kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

2) Upah Nyata (*Real Wages*)

Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari:

- a) besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
- b) besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

3) Upah Hidup

Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

4) Upah Minimum Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (cq. Gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota), dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum, yaitu :

- a) untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsystem dalam suatu hubungan kerja
- b) untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan
- c) untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan
- d) untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan
- e) mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.

5) Upah Wajar

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasanya pada perusahaan. Upah

wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antar upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut adalah :

- a) kondisi perekonomian negara
- b) nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada
- c) peraturan perpajakan
- d) standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri
- e) posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah Upah Bulanan Terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa Pemerintah dalam hal ini Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau bupati/walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum dan pengenaan denda terhadap pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaian diatur dengan peraturan pemerintah (Hardijan Rusli, 2011).

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian KHL yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan Menaker(Menteri Tenaga Kerja). Pencapaian KHL perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh kemampuan dunia usaha. (Hardijan Rusli, 2011).

Upah minimum dapat terdiri atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota

- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. (Hardijan Rusli, 2011).

Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional, dan tidak boleh rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan. Penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan beberapa hal secara komprehensif. Dasar pertimbangan menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER01/MEN/1999 sebagai berikut:

- (1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
 - b. Indeks Harga Konsumen (IHK)
 - c. Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan
 - d. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah
 - e. Kondisi pasar kerja
 - f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.
- (2) Untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), di samping mempertimbangkan butir 1 di atas juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan secara sektoral. (Abdul Khakim, 2016).

Terhadap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP-226/MEN/2000 juga mengaturnya di dalam Pasal 19 ayat (2) yang menentukan Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja/Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Propinsi. Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum dimaksud di atas tidaklahserta merta dapat disetujui oleh Gubernur. Di dalam Pasal 20 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP- 226/MEN/2000 dinyatakan bahwa “Berdasarkan permohonan penangguhan

pelaksanaan Upah Minimum, Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan atas biaya perusahaan yang memohon penangguhan.”

Selanjutnya Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum berdasarkan audit dari Akuntan Publik. Apabila permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum disetujui oleh Gubernur, maka persetujuan tersebut berlaku untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Atau dengan kata lain, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat melakukan penangguhan yang tata caranya diatur dengan keputusan Menaker. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Bila penangguhan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

2.6 Tenaga Kerja

Sumber daya manusia (SDM) atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua dari SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau man power. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (*work-ing age population*) (Sumarsono, 2009).

Tenaga kerja memiliki beberapa definisi, menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pada UU No. 25 tahun 1997 mendefinisikan tenaga kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih, sedangkan pada undang-undang terbaru tentang ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 tahun 2013 tidak memberikan batasan umur dalam definisi tenaga kerja, namun pada undang-undang tersebut melarang mempekerjakan anak – anak. Anak-anak menurut UU No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjuntak, 1985). Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkata kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force adalah bagian tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar menghasilkan barang dan jasa.

Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering dinamakan potensial *labor force* (Simanjuntak, 2015). Besarnya penyediaan atau supply tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Di antara mereka sebagian sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa. Mereka dinamakan golongan yang bekerja atau *employed persons*. Sebagian lain tergolong yang siap bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan, mereka dinamakan pencari kerja atau penganggur. Jumlah yang bekerja dan pencari kerja dinamakan angkatan kerja atau *labor force* (Simanjuntak, 2015).

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap tenaga kerja antara lain:

- 1) Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain.
- 2) Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan.
- 3) Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi.
- 4) Elastisitas persediaan faktor produksi perlengkapan lainnya.

2.7 Kemiskinan

Menurut Chambers, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- 1) kemiskinan (*proper*)
- 2) ketidakberdayaan (*powerless*)
- 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)
- 4) ketergantungan (*dependence*), dan
- 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Secara umum kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/hari.
- 2) Kemiskinan relatif Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial di manaseseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan relatif berkaitan erat dengan permasalahan distribusi pendapatan.

BAB III. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder, Singarimbun (2011) mengungkapkan bahwa metode penelitian data sekunder ini, diperoleh dari lembaga, instansi atau lembaga-lembaga resmi yang terlebih dahulu telah mengumpulkan dan memproses data.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* yang meliputi kurun waktu 2011-2021 , terdiri dari data

1. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi
2. PDRB Provinsi Jambi
3. UMP di Provinsi Jambi
4. Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari

1. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi .
2. Kantor BAPPEDA Provinsi Jambi.

3.3 Analisis Data

Untuk menjawab perumusan masalah pertama didalam penelitian ini, maka penulis akan memasukan rumus perkembangan, dengan rumusan sebagai berikut:

$$G = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana

G = Perkembangan Variabel

X_t = Perkembangan Variabel tahun Ke-n

X_{t-1} = Perkembangan Variabel Tahun Sebelumnya

Untuk mendapatkan jawaban dari perumusan masalah kedua, maka digunakan alat analisis regresi linier berganda, dengan persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \text{Log } X_3 + e \text{ Dimana}$$

Y = Variabel Dependen (Kemiskinan)

X_1 = Variabel Independen (PDRB)

X_2 = Variabel Independen (UMP)

$\text{Log } X_3$ = Variabel Independen (Kesempatan Kerja) α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

e = Variabel Lain Yang Tidak Diteliti Atau Dimasukan Dalam Model

3.4 Pengujian Hipotesis

Untuk melihat pengaruh variabel apakah PDRB, dan ump memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Propinsi Jambi, maka hipotesis dilakukan dengan cara yaitu :

a. Uji t

Uji t merupakan pengujian signifikansi koefisien regresi parsial (individual) dengan kriteria t-statistik:

$$H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0 \quad H_a: \alpha_1 \neq 0; \alpha_2 \neq 0; \alpha_3 \neq 0$$

$$\text{Nilai t-hitung diperoleh dari } t = \frac{\beta_1 - \beta_2}{S_e(\beta_1)}$$

Selanjutnya nilai t_h dibanding dengan nilai t-tabel :

H_0 ditolak dengan kriteria t-hitung lebih besar dari t-tabel ($t_h > t_t$) pada taraf nyata sebesar α 5% berarti hipotesa nol ditolak dan hipotesa *alternative* diterima. Hal ini berarti secara individual variabel bebas (pdrb dan ump) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (kemiskinan)

H_0 diterima dengan kriteria t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($t_h < t_t$) pada taraf nyata sebesar α 5% berarti hipotesa nol diterima dan hipotesa *alternative* ditolak. Hal ini berarti secara individual variabel bebas (pdrb dan ump) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (kemiskinan).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

$$F_{Reg} = \frac{R(N-m-1)}{m(1-R^2)}$$

Keterangan

F_{Reg}		= Harga F garis regresi
N		= Cacah kasus
M		= Cacah prediktor
R^2		= Koefisien determinan antara kriterium dan predictor

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bila F_{hitung} sama dengan atau lebih besar dari F_{tabel} pada taraf signifikansi 5%, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat signifikan. Sebaliknya, apabila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t mempunyai nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (p-value) $< 0,05$, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2014).

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk melihat besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Besarnya koefisien determinasi adalah $0 < R^2 < 1$. Jika angka koefisien ini mendekati 1 berarti nilainya baik, artinya semua variabel bebas yang dipilih mewakili variabel lainnya dalam melihat pengaruhnya terhadap variabel terkait. Namun jika nilai koefisiennya mendekati nol berarti variabel bebas yang dipilih kurang baik atau kurang mewakili sehingga perlu ditambah atau diganti dengan variabel lain yang dianggap dapat lebih mewakili, untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Namun jika nilai koefisiennya mendekati nol berarti variabel bebas yang dipilih kurang baik atau kurang mewakili sehingga perlu ditambah atau diganti dengan variabel lain yang dianggap dapat lebih mewakili, untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat.

3.5 Defenisi Operasional Variabel

Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel terikat dan variabel bebas.

1. Variabel Jumlah Penduduk Miskin (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk miskin merupakan jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, dalam satuan jiwa

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu:

a. PDRB (X_1)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) banyaknya output yang dihasilkan oleh Provinsi Jambi selama periode penelitian dalam satuan rupiah

b. UMP (X_2)

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya di suatu daerah pada suatu tahun tertentu. Upah dalam penelitian ini sebagai ukuran adalah Upah Minimum Provinsi di Jambi selama periode penelitian. Variabel ini dinyatakan dalam satuan rupiah.

c. Kesempatan Kerja (X_3)

Kesempatan kerja dalam penelitian ini merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia di Provinsi Jambi selama periode penelitian yang dinyatakan dalam satuan persentase

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Transportasi	250.000,-
2	Pembelian bahan habis pakai	400.000,-
3	Konsumsi	250.000,-
4	Penerbitan Jurnal	600.000,-
Jumlah		1.500.000,-

4.2 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun Ke-1 (Bulan Ke)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Studi Literatur	■	■	■									
2	Pengumpulan data penelitian dari Instansi terkait				■	■							
3	Tabulasi, pengolahan dan analisis data						■						
4	Penyusunan laporan							■	■				
5	Pembuatan artikel jurnal dan seminar hasil penelitian									■	■	■	
6	Penyerahan hasil laporan Penelitian												■

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arsyad, Lincolin, 2013, *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- BPS, 2012. *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data. Pendataan Program Perlindungan Sosial*.
- Dewanto, 2014, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kawasan Mebidangro. Sumatra Utara* (Jurnal).
- Ghozali, Imam, 2014. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Ketiga*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harahap, 2016. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi 1-10*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hardijan Rusli, 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012. *Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro, Mudrajad, 2011. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM. YKPN Yogyakarta.
- Maipita, Indra, 2014. *Simulasi Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap. Tingkat Pendapatan Dan Kemiskinan*". Jurnal Ekonomi dan Keuangan,. Vol.17
- Nugroho, Adi, 2015. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Dengan Metodologi Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika
- Prasetyo, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Samuelson dan Nourdhaus, 2014. *Makro-Ekonomi*. Edisi ke- empat belas, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, 2011. *Metode penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Suparmoko, 2014. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta. BPFE. UGM
- Suryawati, Indah, 2014. *Jurnalitik : Suatu Pengantar Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael, 2012. *Economic Development (11th ed)*. New York: Pearson Wijaya, Jakarta: PT. Grasindo.
- Zaeni Asyhadie, 2017. *Perusahaan dan. Kepailitan*. Jakarta: Erlangga